

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

Martha amelia / 1111800072

(Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Email: marthaamelia1210@gmail.com

Abstract

The existence of this disability denier is still lacking about the attention of the community because it is often seen as contemptuous or underestimated so that his shortcomings in this area often get discrimination or bullying. On the other hand, these people with disabilities also need to make ends meet.

This researcher uses a qualitative method, this researcher uses various techniques, namely data collection in the form of conducting interviews to obtain various clear and accurate information regarding the existing focus of society. The purpose of this study is to determine the role of the Social Service Office in the Implementation of the Social Rehabilitation Policy for Persons with Disabilities in Sidoarjo Regency.

The conclusion obtained from this study is the distribution of the social rehabilitation program of the Sidoarjo Regency Social Service in fulfilling the rights of persons with disabilities with facilities and also benefits to the community with severe disabilities in order to create people with disabilities who are blind and able to live like society in general.

KEYWORDS: SOCIAL REHABILITATION, PERSONS WITH DISABILITIES, POLICY IMPLEMENTATION

Abstrak

Keberadaan penyandang disabilitas ini masih minim tentangnya perhatian dari masyarakat karena sering kali dipandang hina ataupun dipandang sebelah mata sehingga kekurangannya dalam tersebut sering kali mendapat hal diskriminasi atau bullying. Di hal lain para penyandang disabilitas ini juga membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Peneliti ini menggunakan metode yaitu kualitatif, peneliti ini menggunakan berbagai teknik yaitu pengumpulan data dalam bentuk melakukan wawancara untuk mendapatkan berbagai informasi yang jelas dan akurat dalam mengenai fokus permasalahan yang ada. Tujuan dari penelitian ini mengetahui mengetahui peran Dinas Sosial terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyaluran program rehabilitas sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam memnuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan fasilitas dan juga tunjangan pada masyarakat penyandang disabilitas berat guna terciptanya penyandang disabilitas yang bermatabat dan mampu menjalani seperti masyarakat pada umumnya.

KATA KUNCI: REHABILITAS SOSIAL, PENYANDANG DISABILITAS, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas dalam Indonesia seringkali dipandang hina dan juga sebelah mata dianggap tidak layak dikarenakan mempunyai ketidak sempurnaan baik secara fisik dalam melakukan aktivitas dan juga suatu hal pekerjaan. Dari sudut kesejahteraan tentang penyandang disabilitas ini masih minim sekali dalam perhatiannya pemerintah yang sekarang, bisa dilihat dari sekarang banyaknya peraturan tentang undang-undang ataupun suatu kebijakan telah mengatur dalam hak penyandang disabilitas ini mulai dari usia balita sampai usia tua. Orang yang menyandang disabilitas ini mempunyai kekurangan baik pada fisik maupun pada mental yang ada, disabilitas ini berbeda apabila dibanding pada manusia yang umum seperti lainnya, jadi harus mendapat suatu hak pemberdayaan pada kegiatan hal tentang positif dalam menambahnya tentang dapatan hal atau memberi percaya diri pada kemampuannya, dari adanya berbagai tentang kehidupan pada penyandang disabilitas hal ini agar masyarakat harus menjadi yang lebih produktif. Mereka ini wajib mengikuti dalam melakukan hal-hal kegiatan yang dalam menghasil nilai yang maksimal bagi tersendiriya atau juga memenuhi dalam memberi hal baik pada masyarakatnya dan juga pemerintahan.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan tentang hal-hal yang diperlukan untuk tugas pertanggung jawaban dalam menjalani suatu organisasi yang ada, dan melakukan suatu tugasnya ataupun juga fungsi ini dalam pelaksanaan dan nantinya pembina pada bidang sosial ini dapat berjalannya dalam secara efektif maupun juga efisien. Meski dalam Dinas Sosial ini masih mempunyai perhambatan pada memenuhi tugas berdayaan pada penyandang disabilitas tetapi Dinas Sosial ini sudah memberikan yang baik pada penyandang disabilitas. Dari aturan yang dapat diberikan kepada bupati dalam struktur organisasinya juga tatakajanya pada Dinas Sosial ini terdapat rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas yang ada diluar panti ataupun lembaga, pelayanan tuna wisma ataupun keluarga fakir miskin dan perdagangan orang.

Dari hal ini tersebut masih terdapat orang tua wali dari penyandang disabilitas ini yang mendapatkan kendala mengenai bantuan program yang telah di berikan oleh pemerintah, program bantuan yang diberikan terkadang masih ada kendala dengan keterlambaan pemberian atau dikarenakan masih kurang dalam memberikan informasi yang kurang sesuai dengan target sasarannya

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah yang tertera, bahwa tujuan yang akan dituju pada peneliti yaitu bagaimana untuk mengetahui peran Dinas Sosial terhadap Implementasi Kebijakan Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Peneliti pada penelitian ini dapat di harapkan berguna untuk memberi wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, khususnya pada bidang matakuliah Administrasi Publik dalam memberikan suatu pemahaman terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Manfaat praktis

Sebagai refrensi dalam bahan-bahan bacaan dan juga sebagai sumber-sumber data ataupun informasi yang ada pada hubungannya dengan Rehabilitasi Sosial (Rehsos) terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gagasan bagaimana cara Dinas Sosial dalam Implementasi Rehabilitas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan jenis Penelitian Kualitatif.

Fokus yang menjadi pertimbangan awal pada penelitian ini adalah cara atau partisipasi tindakan nyata dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mengentaskan penyandang disabilitas yang lebih tertuju dalam tindakan nyata atau strategi tentang Implementasi Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan No 45 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61226 sebagai objek dalam penelitian.

Sumber dalam data yang akan digunakan pada Penelitian ini yaitu data primer dan data skunder yang dimana kedua unsur tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penarikan dalam pembahasan. Untuk mendapatkan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada jurnal penelitian (Roeslie & Bachtiar, 2018) terdapat pemilihan jenis model implementasi kebijakan publik yaitu implementasi yang berpola dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Implementasi kebijakan model Edward III adalah model implementasi yang bersifat "top down". Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan pertanyaan, yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Serta apa yang mengakibatkan implementasi kebijakan mengalami kegagalan. Edwards III mencari jawaban dengan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan menguraikan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.

Pada hakikat birokrasi pada prosedur syarat dari pendataan masyarakat penyandang disabilitas merupakan unsur yang dikaitkan sebagai suatu pemerintahan yang bertujuan sebagai alat negara dalam membantu menangani permasalahan warga khususnya penyandang disabilitas. Dengan demikian program yang dijalankan oleh instansi pemerintah harus juga memberikan informasi yang tepat sasaran sebagai rumusan program pemenuhan hak disabilitas. Adanya sosialisasi bagi pendamping penyandang disabilitas adalah sebagai motivasi arahan yang diberikan oleh dinas sosial dalam memenuhi hak masyarakat. Pada setiap wilayah sudah ada TKSK yang bertanggung jawab pada pendaftaran serta pendataan bagi penyandang disabilitas yang nanti akan di evaluasi dengan kriteria sebagai masyarakat yang dibantu oleh pemerintah. Pada pengaplikasiannya pihak dari pemerintah kecamatan meninjau langsung ke lapangan saat pendataan pada penyandang disabilitas itu sendiri, kemudian hasil dari lapangan tersebut

dievaluasi dengan Dinas Sosial sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan fasilitas penyandang disabilitas.

Transformasi dalam pencapaian mekanisme oleh dinas sosial kepada penyandang disabilitas Peran ini masyarakat menginformasikan apabila terdapat anggota keluarga atau kerabat dari penyandang disabilitas berat melalui proses pendaftaran pada setiap wilayah di kecamatan dan sudah ada pihak pemerintah yang menangani sebagian penyandang disabilitas yaitu TKSK. Pada hal ini proses melakukan program atau kegiatan sejak adanya pendekatan pada masyarakat, serta evaluasi hasil dari tinjauan lapangan dan kualifikasi pada penyandang disabilitas hingga dapat bantuan pencairan dana dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai target sasaran pada tujuan program.

Proses program implementasi ini dalam kegiatan bantuan bagi penyandang disabilitas berat dapat meliputi tahap sosialisasi dengan penyampaian tentang adanya informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan pengenalan ini dalam bantuan bagi penyandang disabilitas berat melalui skema yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah pada pertemuan sosialisai yang sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan dalam waktu yang telah ditetapkan di setiap wilayah kecamatan. Pendataan dan sosialisasi ditunjukkan kepada para pelaksana, tokoh masyarakat tentang penjelasan terkait pelaksanaan bagi bantuan ini dalam penyandang disabilitas berat kemudian dilakukan tahap seleksi oleh Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari seleksi yang dipilih selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Sosial sebagai bahan pertimbangan evaluasi.

Mekanisme dasar dalam penyaluran hak penyandang disabilitas tergolong efektif karena adanya pihak dari Dinas Sosial dan dibantu oleh Kementerian dalam pembagian wilayah agar tepat sasaran pada kejadian ilmiah lapangan. Terdapatnya pendamping lapangan serta pemberian langsung oleh kementerian yang ditugaskan pada setiap wilayah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam membantu penyelenggaraan sesuai lingkup wilayah penugasan.

Berdasarkan pencairan dana yang akan di distribusikan kepada masyarakat penyandang disabilitas, Dana tersebut diambil dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo. Dalam pencairan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada tujuan sasaran diberikan kepada 12.000 orang pada setiap bulannya dengan masing-masing orang diberikan 300 ribu setiap bulannya. Penyandang disabilitas ini mempunyai hak yang sama seperti masyarakat normal seperti yang lainnya tanpa adanya seperti bullying agar tetap berani dalam percaya diri untuk menjalani kehidupan setiap harinya.

Pada umumnya belanja persediaan kebutuhan pada penyandang disabilitas dapat dijual ataupun diserahkan kepada penyandang disabilitas mencakup anggaran yang besar. Tidak semua mampu untuk memenuhi hidup mereka dengan normal oleh karena itu penyandang disabilitas untuk itu diberikannya bantuan uang setiap bulannya sejumlah 300 ribu rupiah bagi yang disabilitas berat diberikannya fasilitas berupa alat bantu pendengaran, ataupun kursi roda CP. Bantuan pada disabilitas berdampak terhadap kemampuan kesehariannya. Bantuan tersebut sebagai kepedulian kepada masyarakat serta membantu keringanan pada penyandang disabilitas tersebut, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai yang dijelaskan pada

Pemerintah pada dasarnya dapat menetapkan strategi untuk mengelola penyandang disabilitas sebagai bagian dari kebijakan pada tanggung jawab tugas dan fungsi sebagai bagian dari strategi penyaluran hak atas fasilitas kepada penyandang disabilitas Keberhasilan dalam kebijakan ini adalah tercapainya implementasi yang terdapat hasil dari evaluasi yang dimana hasil evaluasi ini terdapat dua faktor yang dimana faktor penghambat dan juga faktor pendukung.

Faktor-faktor pada Penyaluran Hak Penyandang Disabilitas yaitu:

Faktor pendukung:

Berjalannya program penyaluran pada hak penyandang disabilitas berat anatara lain adanya kerjasama Dinas Sosial dan pihak kementerian yang terintegrasi antara TKSK dilapangan dengan pendamping, keluarga dalam penyaluran bantuan. Penerima bantuan fasilitas pada penyandang disabilitas berat dengan sabar menunggu bantuan yang diberikan. Pada peran ini pelaksana aktif dalam mengkoordinasikan tentang semua informasi yang terkait dengan kegiatan penyaluran hak orang dengan disabilitas berat dengan diberikannya fasilitas barang seperti alat pendengaran, kursi roda CP dan bantuan uang. Peran sebagai pendamping mediator pada penyampain bantuan ini sudah cukup baik oleh penerima dan sehingga pelaksanaanya sangat lancar dalam memberikan informasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa program yang diberikan oleh Dinas Sosial memberikan bagian-bagian anggota tersendiri sehingga program yang di berikan berjalan dengan lancar semestinya, informasi yang diperoleh ini juga sudah diterima sangat baik oleh penerima dalam memberikan informasi terkait.

Faktor Penghambat:

Tidak adanya petugas TKSK yang meberikan keputusan langsung pada wilayah yang ditugaskan, sehingga selama proses dan implementasinya hanya menambah pengetahuan dan memberikan arahan dan pemahaman yang terkait hak penyandang disabilitas, serta pengetahuan khusus dalam informasi standart pelayanan bagi kondisi disabilitas yang berbeda-beda.

Pencairan dana yang diberikan penyandang disabilitas sungguh memakan waktu yang tentunya tidak sebentar dan tidak lama, jadi harapan masyarakat yang telah mendatakan penyandang disabilitas tersebut merasa sudah selsai dan segera dapat bantuan. Tentunya untuk mendapatkan fasilitas tersebut haru adanya tinjauan lapangan dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah dan berhubungan dengan Kementerian Sosial dalam menangani orang penyandang disabilitas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dinilai sangat responsif terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pelayanan yang efektif melalui adanya hak yang dikaji pada kebijakan yang diberikan oleh aparaturn pemerintah. Dapat dilihat melalui pelayanan yang prima dan efektif melalui informasi yang ditempatkan di kecamatan sebagai wadah masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau sekeedar mencari informasi mengenai adanya penyaluran hak-hak penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa implementasi yang diberikan oleh pemerintah terdapat program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di lingkungan Kabupaten Sidoarjo prosedur dan pelaksanaanya sudah berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan program yang di kaji dalam megimplementasikan suatu kebijakan rehabilitas sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidorjo memberikan program berupa penyaluran hak pada penyandang disabilitas.

Penyaluran hak disabilitas pemerintah sidoarjo membagi beberapa TKSK sebagai penanggung jawab dilapangan untuk pemberian informasi dan prosedur syarat diberikannya

fasilitas bantuan oleh pemerintah daerah. Selain itu pengkajian dan evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebagai pertimbangan pada penyandang disabilitas memenuhi kualifikasi yang nantinya akan di tinjau lebih lanjut oleh pengembang dalam bidang rehabilitas sosial.

Berjalannya implementasi ini sudah dirasa efektif dengan memberikan bantuan uang dan alat bantu berupa alat pendengaran, kursi roda CP dan juga uang 300 ribu. Sebagaimana fasilitas tersebut di berikan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi kualifikasi dalam pemberian bantuan fasilitas. Dengan adanya pelayanan informasi yang memeadai serta masyarakat tidak cukup jauh-jauh untuk mencari informasi ke pusat, dan dapat dirasa efektif karena di setiap wilayah kecamatan sudah ada penanggung jawab (TKSK) bagi kebijakan itu sendiri. Kemampuan yang diberikan oleh TKSK dirasa sangat memuaskan dalam memberikan petunjuk dan prosedur kepada masyarakat tetapi hanya bisa memberikan informasi, untuk penanganan cepat yang diberikan oleh TKSK hanya penyampain informasi dan pendataan, hasil tersebut tidak bisa langsung terealisasikan karena adanya tahap evaluasi dan tinjauan lapangan oleh pemerintah daerah kepada pemyandang disabilitas.

B. Saran

1. Dengan adanya program Rehabilitasi Sosial ini seharusnya penyandang disabilitas diberikan dukungan, perhatian dan hak yang lebih agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada dari pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan solusi melalu penjelasan informasi yang jelas pada setiap wilayah seperti di pusat informasi pelayanan di kecamatan serta adanya penyuluhan sosialisasi yang diadakan dengan jadwal setaip 1-2 bulan sekali
2. Bagi Orang tua atau wali pendamping penyandang disabilitas sebaiknya pendataan dan pencarian informasi alangkah baiknya ke pemerintah kecamatan sebagai tanggapan pertama untuk pemenuhan hak pada penyandang disabilitas.
3. Pada pelaksanaa sosialisai yang diadakan oleh Dinas Sosial harus lebih dalam menangani dan meberikan informasi agar tidak adanya miskomunikasi agar berjalannya kebijakan ini tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Y. (2021). Peran Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemberdayaan Penyandangdisabilitas. *Jurnal Mentari Publika*, 02(01), 93–108.
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). *Jurnal Governance. Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tikala*, 1(1), 1–8.
- Allo, E. A. T. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2), 127–142. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Budiman, farida Romaito pohan, A. (2021). *Upaya Dinas Sosial Terhadap Orang-Orang Berkebutuhan*. 13(1), 55–67.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86–102.
- Krisnada, K., & Widodo, S. (2019). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Sosial Kota Kediri. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 3(1), 1300–1310. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.1357>
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(3), 278–292. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170>
- Naibaho, M., Krisnani, H., & H., E. N. (2015). Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 331–340. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13580>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 7(2), 64–73.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.